

**KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM
MENGHADAPI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI
TAHUN 2012
(Studi Pada Siswa/Siswi SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta Se-Kota Kendari)**

Muhammad Zein Abdullah

Dosen Pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Haluoleo Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu
Kendari Sulawesi Tenggara 93232

(Makalah diterima tanggal 18 Oktober 2011- Revisi tanggal 5 November 2011)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik pemilih pemula terhadap Siswa/Siswi SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Kota Kendari. Melalui pendekatan teknik komunikasi pendidikan politik secara persuasif sebagai upaya meningkatkan kesadaran responden pemilih pemula akan pentingnya memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 yang akan datang. Hal tersebut menjadi lebih penting karena responden (pemilih pemula) adalah para aktor yang akan menggerakkan jaringan kehidupan masyarakat luas sehingga terjadi gerakan memilih dengan kesadaran dan partisipasi politik secara bertanggung jawab. Artinya, kesadaran dan peningkatan partisipasi politik dari masyarakat akan menjamin munculnya kehidupan politik yang aman dan demokratis. Pemilih pemula memiliki peran yang sangat besar dalam hal mengurangi tingkat apatisisme politik dalam Pemilu pada secara langsung ini.

Kata Kunci: Komunikasi, Kesadaran dan Partisipasi Politik, Pemilih Pemula

Abstract

The purpose of this study is to increase awareness and political participation of the young voters, public and private SMA/SMK/MA in Kendari. By using a technical approach in political education and persuasive communication in an effort to increase awareness of the importance of voting in the general election of mayor and vice mayor Kendari upcoming year, 2012. This issue becoming more important because the respondents (young voters) are the actors who will run the network of the wider society so that it would create a movement to vote with awareness and political participation in a responsible manner. That is, awareness and increased political participation of the community will ensure the emergence of political life that is safe and democratic. Young voters have a very big role in terms of reducing the level of political apathy in the general election.

Keywords: Communication, Awareness and Political Participation, Young Voter

PENDAHULUAN

Kota Kendari sedang menyiapkan perangkat dalam rangka pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang rencananya akan digelar tahun 2012 mendatang. Pemilu Langsung yang

merupakan pesta lima tahunan dalam sistem demokrasi Indonesia dan di daerah sudah siap digelar.

Pemilukada di Kota Kendari tahun 2012 mendatang, menurut data KPU diperkirakan diikuti oleh sekitar 230.000 pemilih wajib. Dari jumlah tersebut sebagian

di antaranya (tidak ada data) adalah pemilih pemula, atau pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. Bagaimana kecenderungan orientasi politik kelompok pemilih pemula ini? sangat menarik dicermati. Mereka umumnya berada pada masa *adolesens* (pasca remaja, usia 17-21 tahun), yang mulai melakukan introspeksi untuk menemukan keseimbangan antara sikap ke dalam diri dengan sikap kritis terhadap objek-objek (termasuk objek-objek politik) di luar dirinya.

Sebagai data pembanding, berdasarkan studi hasil temuan Tim Litbang Bali Post (Bali Post, 4 April 2009) dalam jajak pendapat terhadap 150 siswa kelas tiga pada beberapa SMA Negeri di Denpasar yang telah mengikuti simulasi pemilu menjelang Pemilu 2009 yang lalu, setidaknya bisa memberikan gambaran orientasi politik mereka sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2009 yang lalu. Kelompok pemilih pemula ternyata sebagian besar (64%) akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. Tetapi, bayang-bayang perilaku "memilih untuk tidak memilih" (golput) masih ada, karena 26,4% dari mereka mengaku tidak tahu apakah akan menggunakan hak pilihnya, dan 7,2% lainnya tidak akan menggunakan hak pilihnya.

Studi tersebut tampaknya masih rasional untuk dikaitkan dengan kondisi pemilih pemula menghadapi Pemilu di Kota Kendari. Adanya kecenderungan orientasi politik seperti itu merupakan peringatan bagi parpol pengusung calon dan calon walikota/wakil walikota itu sendiri untuk lebih meningkatkan pelaksanaan beberapa fungsinya yang selama ini terabaikan dan hanya dijalankan menjelang pelaksanaan Pilkada. Pertama, pembenahan sistem perekrutan anggota parpol dan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari, agar calon yang diajukan benar-benar berkualitas dan berbakat sebagai pemimpin. Proses ini semestinya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pemilu, agar para calon yang diikuti dalam pemilu lebih memasyarakat dan tidak dimunculkan lagi calon "karbitan". Kedua, pemilih pemula sebagian besar berada di kelompok "sekaa teruna", siswa sebagai Pemilih Pemula SMA/SMK dan mahasiswa.

Parpol hendaknya berupaya "merangkul" kelompok ini lewat fungsi sosialisasi dan komunikasi politik, seperti ceramah, dialog, kursus, maupun pendidikan politik lainnya. Jangan lagi ada parpol yang "alergi" datang ke sekolah atau ke kampus dalam rangka menjalankan fungsi ini. Dan, *last but not least*, meningkatkan fungsi parpol melakukan artikulasi terhadap berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam peran seperti itu akan terjadi interaksi intensif antara parpol dengan rakyat, baik secara kelompok maupun individu. Kehati-hatian masih diperlukan mengingat tingginya resistensi masyarakat terhadap unsur-unsur politik "kotor" yang sangat potensial menggagalkan upaya menjadikan Pemilu 2009 sebagai titik tolak merubah keadaan bangsa menjadi lebih baik.

Dalam kategori politik, kaum remaja dimasukkan dalam kelompok pemilih pemula. Mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Dengan hak pilih itu, kaum remaja yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah ini akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama dengan kaum dewasa lain. Selain itu, kaum remaja ini menjadi sasaran paling empuk untuk diperebutkan. Jumlah pemilih pemula yang berkisar pada angka 20 juta orang dalam pemilu sangat menggiurkan dari segi kemenangan dan kekalahan dalam pemilu (Piliang, 2009).

Hanya, belum banyak partai politik yang melakukan pendidikan politik serius terhadap pemilih pemula ini. Mereka menggantungkan informasi politik kepada berita-berita di media massa, sesama teman, orang tua, atau guru di sekolah. Sehingga, program *Civic Engagement in Democratic Governance (Cived)* sebenarnya menjadi bagian penting dari sosialisasi politik dan demokrasi sejak dini bagi pemilih pemula tersebut. Kegiatan tersebut bisa menjadi parameter untuk menentukan tingkat kematangan kaum remaja (pemilih pemula) dalam memaknai demokrasi.

"Penyelewengan" makna demokrasi menjadi nasionalisme atau patriotisme itu menunjukkan perspektif yang dipungut dan didapat oleh kaum remaja dari kalangan elite

politik dan pemerintahan. Kita menyaksikan bagaimana politikus dalam partai-partai politik lebih banyak bicara tentang nasionalisme ketimbang demokrasi itu sendiri. Bahkan ada juga pemimpin politik yang mempertanyakan dengan tegas urgensi dari demokrasi, dengan cara membenturkan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Demokrasi malah ditafsirkan sebagai prosedur, cara, atau alat, sementara tujuannya adalah kesejahteraan.

Pemilu adalah satu bagian penting dalam demokrasi. Secara sederhana, pemilu adalah cara individu warga negara melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pemilih. Pemilu bukan pemberian mandat secara total, sehingga klaim bahwa satu partai politik tertentu memiliki pemilih dengan jumlah total tertentu dalam pemilu sebelumnya menjadi tidak tepat. Untuk menjalankan mandat itu, partai politik atau *legislator* partai politik harus juga melakukan proses komunikasi politik dengan tujuan meminta persetujuan warga negara, terutama untuk kebijakan-kebijakan krusial dan memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Kaum remaja tentu memiliki mimpi-mimpi tersendiri tentang demokrasi dan untuk apa demokrasi ada. Kaum remaja yang mempunyai orang tua cenderung merasa lebih nyaman, terutama kalau kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, seperti sekolah, bepergian, berteman, atau memiliki pakaian yang layak. Perhatian yang besar kaum remaja atas penampilan diri menimbulkan sikap yang kadang negatif, yakni menutupi apa yang mereka anggap sebagai kelemahan, seperti kekayaan atau jabatan keluarga. Persoalan kaum remaja menjadi tambah runyam ketika mereka menjadi sasaran kampanye iklan-iklan konsumerisme dan hedonisme serta dijadikan sebagai lahan penghancuran generasi lewat peredaran narkoba.

Cita-cita kaum remaja ini bisa terkubur secara tragis ketika mereka harus menanggung beban berat akibat ketiadaan perlindungan dari penyelenggara negara. Aspek ini masih belum banyak didiskusikan

oleh kelompok prodemokrasi atau partai-partai politik. Kehancuran ekologis, kehilangan ruang-ruang kota untuk kegiatan komersial, serta ketiadaan uang untuk rekreasi dan membina hubungan sosial dengan anak-anak remaja yang lain, telah menjadi bagian dari mimpi buruk kaum remaja dewasa ini. Bahkan, dalam aspek yang lebih substantif, kaum remaja ini adalah satu mata rantai dari ketiadaan perhatian penyelenggara negara atas nasib kaum ibu yang hamil dan melahirkan, serta atas anak-anak balita yang tidak menerima asupan gizi yang cukup.

Para tokoh politik kita barangkali lebih banyak yang membicarakan nasib orang-orang tua seusia mereka atau yang lebih tua lagi. Yang dibicarakan adalah masa lalu, seperti dendam antar klan dan dinasti politik. Yang dicoba digadang-gadangkan adalah sejarah versi mereka sendiri untuk menancapkan pengaruh di kalangan rakyat bahwa mereka adalah pejuang. Dunia politik meninggalkan anak-anak remaja dan anak-anak balita, sehingga sebetulnya tidak peduli kepada masa depan itu sendiri. Tidak mengherankan kalau kaum remaja menjadi unsur yang terlupakan dari dunia politik dan perdebatan menyangkut demokrasi.

Padahal, untuk memperkuat tegaknya demokrasi, perhatian yang lebih atas kaum remaja ini menjadi penting. Demokrasi akan digoyang terus oleh kepentingan kekuasaan, dinasti politik, klan, familisme, ideologisme, dan segala macam kepentingan kaum tua lainnya. Demokrasi hanya diisi dengan segala macam potret palsu tentang perhatian kepada rakyat, ketika kaum remaja yang nanti menjadi generasi pengganti tidak diikutsertakan dalam mencerna dunia dan masalah-masalahnya. Untuk itu, pendidikan politik yang pada saatnya memengaruhi orientasi politik pemilih pemula yang berdasarkan kepentingan kaum remaja sendiri sangat diperlukan, terutama untuk mencegah agar jangan sampai suara mereka hanya dihitung sebagai "pemilih pemula" yang tidak tahu apa-apa.

Tujuan penelitian "Pendidikan Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari terhadap Siswa/Siswi

SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Kota Kendari" ini adalah: (1) Meningkatkan kesadaran pemilih pemula di Kota Kendari akan arti pentingnya memilih dalam pemilihan umum khususnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2012 mendatang; (2) Meningkatkan pengetahuan pemilih pemula tentang tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2012; (3) Meningkatkan partisipasi politik secara mandiri dari pemilih pemula dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2012; (4) Mendorong agar pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2012 berjalan secara demokratis, aman dan damai serta sesuai dengan azas Luber dan Jurdil, dengan membekali pemilih pemula dengan kesadaran dan pemahaman yang tinggi demi peningkatan kualitas kepemimpinan di Kota Kendari dalam lima tahun mendatang.

LANDASAN KONSEP

Komunikasi Politik

Kraus dan Davis dalam Arifin (2003: 10) melukiskan komunikasi politik sebagai proses komunikasi massa dan elemen-elemen di dalamnya mungkin mempunyai dampak terhadap perilaku politik. Dalam hal ini Davis membagi komunikasi politik menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi dan informasi politik, penggunaan media dan proses politik, dan konstruksi realitas politik.

Mc.Luhan dalam Arifin (2003: 10) menguraikan bahwa media adalah alat perpanjangan alat indera manusia. Dengan media kita memperoleh informasi tentang benda, orang, dan tempat yang kita alami secara langsung. Mc.Luhan menyebut bahwa media atau medium adalah pesan (*The medium is the message*). Artinya medium sudah menjadi pesan. Menurut Mc.Luhan bahwa yang memengaruhi khalayak bukan apa yang disampaikan oleh media, tetapi jenis media yang dipergunakan, yaitu antarpersona, media cetak atau media elektronik.

Media saluran komunikasi politik

terdiri atas tiga tipe saluran, yaitu: (1). Komunikasi massa terbagi atas dua bentuk. Bentuk pertama terdiri atas bentuk tatap muka, kedua terjadi bila ada perantara di tempatkan antara komunikator dan khalayak menggunakan media TV. (2). Saluran komunikasi interpersonal berupa tatap muka. (3). Komunikasi organisasi penyampaian dari satu- kepada - banyak orang.

Meskipun penggunaan media politik dalam proses politik komunikasi politik dan bentuk komunikasi politik seperti retorika, propaganda, *public relations*, dan kampanye, tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, namun cenderung memengaruhi cara manusia mengorganisasikan citra politik. Hal itulah yang akan memengaruhi cara manusia berpendapat dan berperilaku.

Media pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang merupakan aliran dengan seseorang yang menyatakan gagasan, isi jiwa atau kesadarannya. Dalam hal ini media dapat dibagi ke dalam tiga bentuk. *Pertama*, media yang menyalurkan ucapan (*The Spoken Words*), termasuk yang berbentuk bunyi dan dikenal serta dimanfaatkan sebagai medium utama yang hanya ditangkap oleh telinga, dinamakan juga *The audio media* (media dengar). Media yang termasuk dalam kategori ini antara lain telepon dan radio. *Kedua*, yang menyalurkan tulisan (*The Printed Writing*) dan hanya dapat dilihat oleh mata, disebut juga *the visual media* (media pandang). Media dalam kategori ini, antara lain, selebaran, pamflet, poster, brosur, baliho, spanduk, surat kabar, majalah, dan buku. *Ketiga*, yang menyalurkan gambar hidup dan dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus, *the audio visual* (media dengar pandang). Media yang dimaksud dalam bentuk ini film, (termasuk video) dan televisi.

Selain itu media juga sering dibedakan antara lain media antarpersonal (antar pribadi) seperti telepon, surat, dan telegram dengan media massa seperti pers, radio, film, dan televisi.

Media massa memiliki sejumlah fungsi sosial yang berkaitan dengan politik, yaitu (1) fungsi informasi; (2) fungsi mendidik; (3) fungsi hiburan; (4) fungsi menghubungkan; (5) fungsi kontrol sosial;

dan (6) fungsi membentuk pendapat umum. Tujuan komunikasi politik dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu: (1). Citra politik; terbentuk berdasarkan informasi, melalui proses pembelajaran politiknya atau sosialisasi politik. Terjadi secara antarpersonal maupun melalui media massa (pers, radio, film, dan TV). (2) Pendapat umum sebagai kekuatan politik adalah bentuk efek dari proses komunikasi politik berdasarkan perspektif atau paradigma mekanistik. (3). Partisipasi politik dan pemilu, komunikasi politik, sosialisasi politik, citra politik dan pendapat umum. Menuju pada sasaran dan tujuan yaitu terciptanya partisipasi politik dan kemenangan para politikus dan parpol dalam pemilu. (4). Pemilu dan kebijakan publik. Tujuan komunikasi politik tidak lain ialah memengaruhi kebijakan publik (*public policy*) dalam segi berbangsa dan bernegara.

Pendidikan dan Kesadaran Politik Remaja

Dalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian (Panggabean, 1994: 14). Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang

menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.

Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota *civil society*. Pendidikan dalam artian tersebut merupakan suatu proses yang panjang, sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri. Proses tersebut bukan hanya yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tetapi juga meliputi pendidikan dalam arti yang sangat luas melibatkan keluarga dan juga lingkungan sosial. Lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan proses untuk mendidik warga negara ke arah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi dan sebaliknya harus dihindarkan sejauh mungkin dari unsur-unsur yang memungkinkan tumbuhnya hambatan demokrasi (Arfani, 1996: 64).

Perilaku Politik

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Jack C. Plano, dkk. Dalam Moh. Ridwan, perilaku politik adalah:

"Pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap, dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang tampak (pemungutan suara, gerak protes, lobyng, kaukus, kampanye dan demonstrasi)". Setiap manusia pasti memiliki perilaku (tindakan) tersebut, yakni suatu totalitas dari gerak motorik, persepsi dan juga fungsi kognitif dari manusia.

Sementara Jalaluddin Rakhmat, mendefinisikan tindakan sebagai hasil kumulatif seluruh proses pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologis dan efek dari faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia.

Selain itu, terdapat kaitan yang erat antara perilaku politik dan budaya politik, yaitu bahwa perilaku politik tidak hanya ditentukan oleh situasi temporer, tetapi mempunyai pola yang berorientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik yang bisa disebut peradaban politik. Artinya, perilaku politik tumbuh atas kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlangsung atau tentang ideologi negara yang sedang dianut di masyarakat tersebut serta interaksi yang muncul antara masyarakat, individu dan budaya politik tersebut.

Menurut Gabriel A. Almond, proses politik akan melahirkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang kemudian akan disosialisasikan melalui transmisi kebudayaan, baik melalui pendidikan keluarga, kelompok-kelompok pergaulan, di lingkungan pekerjaan, interaksi melalui model media komunikasi massa, maupun interaksi politik secara langsung. Sehingga Almond kemudian memilahkan kategori budaya politik tersebut atas tiga pemilahan, yaitu budaya politik partisipan, budaya politik subyek dan budaya politik parokialik.

Hubungan Orientasi Politik dengan Perilaku Politik

Dalam pendekatan perilaku, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya dan akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul perilaku itu. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan di mana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya memengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik.

Secara detail, V.O Key dalam Apter (1985: 38) menggambarkan pola munculnya orientasi politik dalam memengaruhi perilaku politik. Dalam model pendekatan perilaku tersebut dijelaskan bahwa awal munculnya orientasi kemudian perilaku politik adalah keinginan masyarakat untuk mewujudkan kepentingannya.

Dalam mewujudkan kepentingan itu, sarana yang digunakannya adalah organisasi-organisasi politik yang oleh penguasa dijadikan sarana untuk memenangkan dukungan sehingga kemudian penguasa dapat mewujudkan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi kelompok pemilihnya. Kembali ke awal, tujuan kemanfaatan bagi kelompok inilah yang menjadi keinginan dan kepentingan rakyat ketika ia mengharapkan organisasi politik yang dipilih mampu mewujudkannya.

Tabel 1.
Pola Munculnya Orientasi Politik

Sarana	Tujuan	
Memenangkan dukungan	Manfaat bagi kelompok	Penguasa
Organisasi politik	Kepentingan	Rakyat

Sumber : V.O Key dalam Apter (1985:35)

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Orientasi Politik Pemilih Pemula

Menurut Mulyasa (2007: 255) faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah siswa. Hal ini menjadi salah satu faktor dalam memengaruhi Siswa sebagai Pemilih Pemula untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

b. Faktor Politik

Arnstein S.R (1969) dalam Eko (2000: 14) peran serta politik masyarakat didasarkan kepada faktor politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi: (1) Komunikasi Politik. Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Dalam hal ini adalah komunikasi politik antara Siswa sebagai Pemilih Pemula dengan pihak sekolah; (2) Kesadaran Politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik.

c. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi, dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya (K. Manullang dan Gitting, 1993: 13).

d. Faktor Nilai Budaya

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1999: 25), Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakikatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik (Soemitro, 1999: 27) atau peradaban masyarakat (Verba, Sholozman, Bradi, 1995). Faktor nilai budaya

menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Manifestasi dari apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh manusia biasanya akan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Dalam konteks perilaku politik, hal yang dipikirkan dan diinginkan tersebut berkaitan erat dengan orientasi politik, yakni kekuasaan di mana kekuasaan itu diperolehnya dengan suatu proses pemilihan.

Dengan demikian, pendekatan perilaku sangat memperhitungkan faktor sosialisasi politik, yaitu cara mendalami nilai-nilai dan kepercayaan yang berlaku dan cara memperhitungkan perubahan yang terjadi. Dalam menjelaskan pola sosialisasi ini, paham perilaku beranggapan bahwa interaksi manusia antara satu dengan yang lainnya adalah sebagai pelaku (subyek) dan membentuk adanya suatu proses politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari sejak Bulan Maret–Mei 2011 terhadap pemilih pemula, yaitu Siswa/Siswi SMA/SMK/ MA Negeri dan Swasta sebanyak 44 Orang. Pemilih pemula adalah seseorang yang berusia 17-21 tahun atau seseorang yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Langsung. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan survei.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu: Studi Pustaka, *Observasi* (pengamatan), *Kuesioner*, dilaksanakan 2 (dua) tahap untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Tahap pertama adalah kegiatan *pre-test*, tahap kedua adalah kegiatan *post-test* sebagai tes akhir dengan materi pertanyaan yang sama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindakan evaluasi dari sebaran kuesioner yang dilakukan berdasarkan teknik komunikasi interpersonal melalui pendidikan

politik kepada pemilih pemula meliputi pemberian tes kepada responden yang dilakukan sebelum diberikan *pre-test* yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan dan pemahaman responden sebelum diberikan materi tentang demokrasi dan pentingnya memilih dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik pemilu ini. Evaluasi kedua dilakukan setelah diberikan materi pendampingan yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh peningkatan pengetahuan dan pemahaman responden terhadap materi yang disampaikan.

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Politik

Jawaban dari pertanyaan tentang pengetahuan politik terhadap 44 responden, dari nilai *pre-test* dapat dijelaskan bahwa *rank* nilai yang dihasilkan oleh responden dapat dilihat bahwa yang sangat tahu hanya 4 orang (9%). Responden yang menjawab tahu sebanyak 15 orang (34%) dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 25 orang (57%). Jika dibandingkan dengan jawaban setelah pelaksanaan sosialisasi dapat dijelaskan bahwa responden yang sangat tahu tentang politik naik menjadi 13 orang (29,50%) atau naik sekitar 20%, dan yang menjawab tahu sebanyak 23 responden (52%) atau naik 18%, dan hanya terdapat 8 (17%) yang tidak tahu atau turun sebesar 40%.

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Demokrasi

Jawaban dari pertanyaan tentang pengetahuan demokrasi terhadap 44 responden, dapat dijelaskan bahwa *rank* nilai yang dihasilkan oleh responden dari *pre-test* dapat dilihat bahwa yang sangat tahu hanya 4 orang (9%). Responden yang menjawab tahu sebanyak 12 orang (27%) dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 28 orang (64%). Jika dibandingkan dengan jawaban setelah pelaksanaan pendidikan politik (*post-test*) dapat dijelaskan bahwa responden yang sangat tahu tentang konsep demokrasi naik menjadi 11 orang (25%) atau naik sekitar 16%, dan yang menjawab tahu sebanyak 25 responden (57,5%) atau naik 30%, dan hanya

terdapat 8 (17%) yang tidak tahu atau turun sebesar 43%.

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Mengapa Harus Berdemokrasi

Jawaban dari pertanyaan tentang mengapa kita harus berdemokrasi terhadap 44 responden, dapat dijelaskan bahwa nilai yang dihasilkan oleh responden dari *pre-test* dapat dilihat bahwa yang sangat tahu hanya 6 orang (14%). Responden yang menjawab tahu sebanyak 12 orang (27%) dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 26 orang (59%). Jika dibandingkan dengan jawaban setelah pelaksanaan pendidikan politik (*post-test*) dapat dijelaskan bahwa responden yang sangat tahu tentang mengapa kita harus berdemokrasi naik menjadi 15 orang (34%) atau naik sebesar 20%, dan yang menjawab tahu sebanyak 23 responden (52%) atau naik 25%, dan hanya terdapat 6 (14%) yang tidak tahu atau turun sebesar 45% dari sebelumnya.

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Pilkada Langsung

Jawaban dari pertanyaan tentang Pilkada terhadap 44 responden, perbandingan hasil jawaban *pre-test* dan *post-test* tentang pemahaman tentang Pilkada dapat dilihat dalam tabel 2.

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Pentingnya Pilkada

Jawaban dari pertanyaan tentang pentingnya Pilkada terhadap 44 responden, dapat dijelaskan bahwa nilai yang dihasilkan oleh responden dari *pretest* dapat dilihat bahwa yang sangat tahu hanya 5 orang (11%). Responden yang menjawab tahu sebanyak 12 orang (27%) dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 27 orang (62%). Jika dibandingkan dengan jawaban setelah pelaksanaan pendidikan politik (*post-test*) dapat dijelaskan bahwa responden yang sangat tahu tentang pentingnya Pilkada naik menjadi 9 orang (20%) atau naik sebesar 10%, dan yang menjawab tahu sebanyak 24 responden (55%) atau naik 28%, dan hanya terdapat 11 (25%) yang tidak tahu atau turun sebesar 38% dari sebelumnya.

Tabel 2
Hasil Pre Test tentang Pengetahuan terhadap Pemilukada Langsung

<i>Pre Test</i>	Frekuensi	%	<i>Post Test</i>	Frekuensi	%
Sangat Tahu	3	7%	Sangat Tahu	10	23%
Tahu	9	20%	Tahu	22	50%
Tidak Tahu	32	73%	Tidak Tahu	12	27%
Jumlah	44	100%	Jumlah	44	100%

Sumber: Hasil Olahan Instrumen Pre-Test dan Post-Test, 2011

Tabel 3
Hasil Pre Test tentang Tahapan Pemilukada Langsung

<i>Pre Test</i>	Frekuensi	%	<i>Post Test</i>	Frekuensi	%
Sangat Tahu	-	-	Sangat Tahu	5	11%
Tahu	-	-	Tahu	30	69%
Tidak Tahu	44	100%	Tidak Tahu	9	20%
Jumlah	44	100%	Jumlah	44	100%

Sumber: Hasil Olahan Instrumen Pre-Test dan Post-Test, 2011

Tabel 4
Hasil Pre Test tentang Penggunaan Hak pilih Pemilukada

<i>Pre Test</i>	Frekuensi	%	<i>Post Test</i>	Frekuensi	%
Sangat Tahu	4	9%	Sangat Tahu	15	34%
Tahu	17	39%	Tahu	25	58%
Tidak Tahu	23	52%	Tidak Tahu	4	9%
Jumlah	44	100%	Jumlah	44	100%

Sumber: Hasil Olahan Instrumen Pre-Test dan Post-Test, 2011

Tabel 5
Hasil Pre Test tentang Syarat Menjadi Pemilih

<i>Pre Test</i>	Frekuensi	%	<i>Post Test</i>	Frekuensi	%
Sangat Tahu	-	-	Sangat Tahu	35	80%
Tahu	37	84%	Tahu	9	20%
Tidak Tahu	7	16%	Tidak Tahu	-	-
Jumlah	44	100%	Jumlah	44	100%

Sumber: Hasil Olahan Instrumen Pre-Test dan Post-Test, 2011

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Undang-Undang yang Mengatur Pilkada Langsung

Jawaban dari pertanyaan tentang pengetahuan terhadap undang-undang yang mengatur Pilkada terhadap 44 responden, dapat dijelaskan bahwa nilai yang dihasilkan oleh responden dari *pre-test* dapat dilihat bahwa yang sangat tahu hanya 3 orang (7%). Responden yang menjawab tahu sebanyak 5 orang (11%) dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 36 orang (82%). Jika dibandingkan dengan jawaban setelah pelaksanaan pendidikan politik (*post-test*) dapat dijelaskan bahwa responden yang sangat tahu tentang undang-undang yang mengatur tentang Pilkada naik menjadi 5 orang (11%) atau naik sebesar 4%, dan yang menjawab tahu sebanyak 27 responden (62%) atau naik 51%, dan hanya terdapat 12 (27%) yang tidak tahu atau turun sebesar 55% dari sebelumnya.

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Tahapan Pilkada Langsung

Jawaban dari pertanyaan mengenai pengetahuan tentang tahapan Pilkada terhadap 44 responden, dapat dilihat dalam tabel 3.

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pilkada

Jawaban dari pertanyaan tentang penggunaan hak pilih dalam Pilkada terhadap 44 responden, dapat dilihat dalam tabel 4.

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Syarat Menjadi Pemilih

Jawaban dari pertanyaan tentang syarat menjadi pemilih terhadap 44 responden, dapat dilihat dalam tabel 5.

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Tata Cara Memilih

Jawaban dari pertanyaan tentang tata cara memilih terhadap 44 responden, dapat dijelaskan bahwa nilai yang dihasilkan oleh responden dari *pretest* dapat dilihat bahwa yang sangat tahu hanya 2 orang (5%).

Responden yang menjawab belum tahu sebanyak 38 orang (86%) dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 4 orang (9%). Jika dibandingkan dengan jawaban setelah pelaksanaan pendidikan politik (*post-test*) dapat dijelaskan bahwa responden yang sangat tahu tentang tata cara memilih naik menjadi 30 orang (68%) atau naik sebesar 63%, dan yang menjawab belum tahu sebanyak 11 responden (25%) atau naik 61%, dan terdapat 3 responden (7%) yang tidak tahu atau turun sebesar 2% dari sebelumnya.

Pengetahuan Pemilih Pemula tentang Pilkada Walikota/Wakil Walikota 2012

Jawaban dari pertanyaan tentang Pilkada Langsung Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 terhadap 44 responden, dapat dijelaskan bahwa nilai yang dihasilkan oleh responden dari *pre-test* dapat dilihat bahwa yang sangat tahu hanya 2 orang (5%). Responden yang menjawab belum tahu sebanyak 9 orang (20%) dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 33 orang (75%). Jika dibandingkan dengan jawaban setelah pelaksanaan pendidikan politik (*post-test*) dapat dijelaskan bahwa responden yang sangat tahu tentang Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kendari naik menjadi 7 orang (16%) atau naik sebesar 11%, dan yang menjawab belum tahu sebanyak 27 responden (25%) atau naik 41%, dan terdapat 10 responden (23%) yang tidak tahu atau turun sebesar 52% dari sebelumnya.

Sikap Pemilih Pemula Untuk Memilih

Jawaban dari pertanyaan tentang sikap untuk memilih terhadap 44 responden, dapat dijelaskan bahwa nilai yang dihasilkan oleh responden dari *pretest* dapat dilihat bahwa yang akan menggunakan hak pilih sebanyak 27 orang (61%). Responden yang menjawab tidak akan menggunakan hak pilih sebanyak 4 orang (9%) dan yang menjawab belum memutuskan sebanyak 13 orang (30%). Jika dibandingkan dengan jawaban setelah pelaksanaan pendidikan politik (*post-test*) dapat dijelaskan bahwa responden yang akan menggunakan hak pilih naik menjadi 34 orang (77%) atau naik sebesar 16%, dan yang

menjawab tidak akan menggunakan hak pilih turun drastis menjadi 0 responden (0%) atau turun 9%, dan terdapat 10 responden (23%) yang belum memutuskan untuk memilih.

Orientasi terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012

Deskripsi hasil penelitian terhadap orientasi terhadap partisipasi politik Pemilih Pemula dalam menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012:

Orientasi Kognitif terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Aspek kognitif Siswa berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap suatu sistem politik, termasuk pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Almond dan Verba, 1990).

Keluarga merupakan pihak pertama yang dapat menentukan pengetahuan seorang anak. Seorang anak pertama kali mendapatkan pengetahuan politik melalui orang tuanya. Kemudian sekolah melalui mata pelajaran Kewarganegaraan. Kelompok pertemanan pun memiliki pengaruh dalam penambahan pengetahuan individu.

Orientasi Afektif terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula.

Orientasi afektif, yaitu kecenderungan emosi dan perasaan terhadap sistem politik, peranannya, keberadaan para aktor dan penampilannya (Almond dan Verba, 1990). Orientasi afektif bergerak di dalam konteks perasaan, seperti perasaan ingin diperhatikan, diuntungkan, merasa adil, sejahtera, suka atau tidak suka, ataupun sejenisnya, yang terkadang hal tersebut dapat lebih menentukan ketimbang faktor pengetahuan.

Media massa juga ikut membantu dalam pembentukan perasaan seseorang terhadap situasi politik.

Orientasi Evaluatif terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Orientasi evaluatif, yaitu pertimbangan terhadap sistem politik menyangkut

keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan (Almond dan Verba, 1990). Orientasi evaluatif merupakan campuran antara orientasi kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan/tindakan.

Orientasi Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Munculnya orientasi dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu objek politik dari masyarakat itu sendiri. Pengaruh dari masyarakat yang dapat memengaruhi orientasi politik adalah melalui lingkungan pertemanan. Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1990), yaitu kelompok pertemanan memengaruhi pembentukan orientasi politik individu melalui beberapa cara, yaitu: kelompok pertemanan adalah sumber sangat penting dari informasi dan sikap-sikap tentang dunia sosial dan politik. Kelompok pertemanan berfungsi sebagai *communication channels*, kelompok pertemanan merupakan agen sosialisasi politik sangat penting karena ia melengkapi anggota-anggotanya dengan konsepsi politik yang lebih khusus tentang dunia politik.

KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan *post test* nilai responden berubah drastis dan menjadi terbalik. Semua responden memahami baik sangat tahu maupun tahu tentang substansi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada peserta.

Apabila nilai hasil pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* dikomparasikan maka diperoleh gambaran kumulatif, yakni peningkatan pemahaman dan pengetahuan responden. Namun dari sisi keperilakuan, ternyata instrumen ini belum mampu memberikan gambaran faktualnya karena waktu pelaksanaan tidak berbarengan dengan

pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan penelitian lanjutan dengan pola yang lebih komprehensif di masa yang akan datang terutama menjelang dan setelah pilkada dilakukan. Namun yang cukup menggembirakan adalah bahwa ada keyakinan bahwa pemilih pemula akan bersikap untuk memilih dalam Pemilukada Langsung Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012 mendatang sehingga meminimalkan golput. Hal ini berarti bahwa kesadaran untuk berdemokrasi meningkat secara baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat disarankan: (1) Perlu pendampingan terus-menerus kepada pemilih pemula dan masyarakat khususnya di Kota Kendari dalam rangka mempertahankan kesadaran politik yang telah terbangun; (2) Para responden yang telah mengikuti pelatihan diharapkan dapat mentransfer pengetahuan dan bahan yang sudah didapatkan di dalam pengabdian kepada para pemilih pemula atau masyarakat lainnya; (3) Pemerintah dalam hal ini KPU Provinsi dan Kota Kendari diharapkan melakukan kegiatan serupa sehingga jangkauan penerima manfaat dari kegiatan dalam upaya peningkatan kesadaran politik bagi pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Apter, David E. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta : LP3ES.
- Arfani, Riza Noer. 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Duverger, Maurice. 1988. *Parpol dan Kelompok Kepentingan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Eko, Sutoro. 2001. *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Politik Pemberdayaan*. Riau : Seminar Internasional Ke Dua.
- G., Marry dan Kweit, Robert. 1986. *Konsep dan Metode Analisa Politik*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mulyasa. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pelajar*. Jakarta : Green School Pendidikan.
- Panggabean 1994. *Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa*. Jakarta : Sinar Harapan
- Poloma, M. Margaret. 1987. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : Rajawali.
- Piliang, Indra J. 2009. *Kaum Remaja dan Demokrasi*. Jakarta : Kibar.
- Prijono, Onny. 1987. *Kebudayaan Remaja dan Sub-Kebudayaan Delinkuen*. Jakarta : CSIS.
- Suhartono, dkk. 2006. *Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada*. Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Varma, S.P. 1995 (cetakan keempat). *Teori Politik Modern*. Jakarta : Grafindo Persada.

Sumber lainya :

Internet :

Manullang K dan Gitting, 1993. *Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik*. Tersedia diakses melalui: <http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pembangunan-desa/>

Surat Kabar :

Bali Post, 4 April 2009